



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRDAUS SULISTIJAWAN
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 652128

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 568.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/350 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 466.000.000
2. Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 235.450.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000
2. MOTOR, BYSON SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.200.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
5. MOTOR, HONDA NF 100TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 950.000
6. MOTOR, YAMAHA 45P/ BISON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
7. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.112.407



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	833.562.407
III. HUTANG	Rp.	26.849.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	806.712.907

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.